



**PERSEPSI STAKEHOLDERS TERHADAP TRANSPARANSI
DAN AKUNTABILITAS PENGELOLAAN KEUANGAN
SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (SMK) NEGERI
DI KABUPATEN LOMBOK TENGAH**

Ishaq¹

Abstract

This study aimed to analyze the differences in perception between internal stakeholders with external stakeholders to transparency and accountability in financial management of the school. The population in this study were all teachers, staff, administrators of the school committee who becomes the object of research, vocational superintendent, Board of Education Central Lombok, and Non-Governmental Peoples, which operates in the field of education. The object of this study is SMKN 1 Central Praya, SMK 1 Praya, SMK 1 Kopang, SMK 1 Pujut, SMK 1 Janapria, SMK 1 Batukliang, SMK 1 North Batukliang, SMK 1 West Praya, and SMK 2 Central Praya. This research is descriptive quantitative research with a sample of 227 people. Statistic analysis results show: 1) the difference in the average perception of internal and external stakeholders on the transparency of financial management SMK in Central Lombok regency; 2) There is no difference in the average perception of stakeholders internal and external to the SMK accountability in financial management in Central Lombok regency.

Keywords : Stakeholders Perception, Transparency, Accountability, Financial Management Schools

1. Pendahuluan

Krisis ekonomi yang melanda Indonesia pada tahun 1997 dan maraknya korupsi kolusi nepotisme (KKN) yang terjadi di era orde baru telah melahirkan reformasi sekaligus menggantikan sistem pemerintahan yang terpusat dengan sistem otonomi daerah. Hal ini ditandai dengan lahirnya UU Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah dan UU Nomor 25 tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah, yang kemudian diperbaharui dengan UU No 23 tahun 2014 dan UU Nomor 33 tahun 2004. Pada masa demokratisasi dan otonomi daerah saat ini sangat diperlukan tata pemerintahan yang baik, yaitu tata pemerintahan yang mengikuti kaidah-kaidah tertentu sesuai dengan prinsip dasar *Good Governance*. World Bank mendefinisikan *Good Governance* sebagai suatu penyelenggaraan manajemen pembangunan yang solid dan bertanggung jawab yang sejalan dengan prinsip demokrasi dan pasar yang efisien, penghindaran salah alokasi dana investasi, dan pencegahan korupsi baik secara politik maupun administratif (Wibowo, 2013)

¹Mahasiswa Maksi Unram

Undang Undang Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari KKN menyatakan dengan tegas bahwa penyelenggara negara yang bersih adalah penyelenggara negara yang mentaati asas-asas umum penyelenggaraan negara dan bebas dari praktek korupsi, kolusi dan nepotisme serta perbuatan tercela lainnya. Menurut UU Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dinyatakan bahwa pembangunan nasional bertujuan mewujudkan manusia Indonesia seutuhnya dan masyarakat Indonesia seluruhnya yang adil, makmur, sejahtera, dan tertib berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Untuk mewujudkan masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera tersebut, maka perlu secara terus menerus ditingkatkan usaha-usaha pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pada umumnya dan tindak pidana korupsi pada khususnya.

Intruksi Presiden Nomor 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, menyebutkan bahwa setiap instansi pemerintah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan negara wajib mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya serta kewenangan strategik yang yang ditetapkan oleh masing-masing instansi. Dalam Undang Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara, dinyatakan bahwa pada prinsipnya pengelolaan keuangan negara oleh pemerintah pusat dan daerah harus secara tertib taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.

Sekolah sebagai institusi yang menyediakan layanan pendidikan, menjadi tempat bagi masyarakat untuk menyerahkan mandat mendidik putra putrinya. Melalui sekolah, masyarakat berharap putra putri mereka akan menjadi insan yang unggul, baik dari segi kognitif, afektif, dan psikomotorik. Untuk mewujudkan harapan masyarakat tersebut tidaklah mudah, karena banyak kendala yang dihadapi dalam dunia pendidikan, salah satunya adalah masalah pembiayaan (Wibowo, 2013).

Menurut Boediono dalam Wibowo (2013), terdapat beberapa masalah fundamental dalam pembiayaan pendidikan, diantaranya : pemerintah daerah yang sejatinya mampu membantu pembiayaan pendidikan di daerahnya, tidak dilibatkan dalam menentukan besarnya Dana Alokasi Umum (DAU); sistem pembiayaan yang tidak transparan terjadi karena mekanisme akuntabilitas sekolah belum bisa berjalan efektif; banyak sumber-sumber pembiayaan pendidikan yang tidak sampai di sekolah lantaran tertahan di kabupaten/kota; dan tingkat pembiayaan yang tidak memadai (Wibowo, 2013).

Pendidikan sebagai salah satu sektor pembangunan tidak terlepas dari masalah pendanaan, sebab untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional sangat diperlukan anggaran yang memadai. Anggaran pendidikan yang memadai tidak bisa sepenuhnya dicukupi oleh pemerintah, hal ini dikarenakan begitu banyaknya sektor pembangunan yang harus ditangani pemerintah. Oleh karena itu peran serta masyarakat dalam pengelolaan dan pendanaan pendidikan mutlak diperlukan. Berkaitan dengan pendanaan pendidikan, Undang Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menyatakan bahwa :

1. Pendanaan pendidikan menjadi tanggung jawab bersama antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah dan masyarakat.

2. Sumber pendanaan pendidikan ditentukan berdasarkan prinsip keadilan, kecukupan, dan keberlanjutan.
3. Pengelolaan dana pendidikan berdasarkan prinsip keadilan, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas publik.

Pengelolaan dana pendidikan baik yang bersumber dari pemerintah maupun masyarakat, harus dilandasi semangat akuntabilitas dan transparansi. Dengan pengelolaan yang akuntabel dan transparan, masyarakat dapat mengetahui kemana dana sekolah itu dibelanjakan. Namun dari hasil pemantauan yang dilakukan oleh *Indonesia Corruption Watch* (ICW) dari tahun 2003 sampai dengan tahun 2013 menunjukkan bahwa banyak sekolah yang tidak pernah mengumumkan jumlah subsidi yang telah diterima dari pemerintah serta tidak pernah memberikan laporan pengelolaan dana kepada masyarakat secara transparan. Padahal dalam perspektif akuntansi, setiap kepala sekolah wajib menyampaikan laporan di bidang keuangan, terutama mengenai penerimaan dan pengeluaran sekolah kepada komite sekolah dan pemerintah. Hal ini akan menjamin akuntabilitas publik, khususnya bagi pengguna jasa pendidikan. Menurut Bastian (dalam Sutedjo, 2009), kenyataan di lapangan menunjukkan masih terjadi penyimpangan pengelolaan keuangan sekolah seperti :

1. Dalam proses pengambilan kebijakan strategis pengelolaan keuangan sekolah, kepala sekolah belum melibatkan *stakeholders*, sehingga masih terjadi pengalokasian anggaran yang tidak mencerminkan prioritas, sifat, dan kebutuhan siswa.
2. Makin mahalnya pungutan pada masyarakat oleh sekolah negeri, sehingga akses orang miskin untuk memperoleh pendidikan menengah yang baik semakin tertutup.
3. Komite sekolah tidak memiliki akses yang memadai terhadap sumber-sumber dana yang diperoleh sekolah.
4. Manfaat informasi yang dihasilkan oleh laporan keuangan sekolah belum maksimal untuk bahan pengambilan keputusan entitas sekolah.
5. Kuatnya dominasi kepala sekolah dalam setiap pengambilan keputusan, menyebabkan rendahnya keinginan kepala sekolah untuk mempertanggungjawabkan keuangan sekolah dan melemahkan fungsi pengawasan melalui komite sekolah, sehingga membuka peluang bagi penyalahgunaan kewenangan dalam pengelolaan keuangan sekolah.
6. Masih adanya perbedaan persepsi diantara *stakeholders* tentang pengelolaan keuangan sekolah.

Selama ini sekolah hanya memiliki laporan seadanya, padahal lebih dari itu sekolah dituntut memiliki laporan pertanggungjawaban yang lengkap meliputi neraca, laporan surplus, defisit, laporan arus kas, dan perhitungan biaya yang dihabiskan tiap siswa, sehingga pemerintah maupun *stakeholders* dapat mengetahui berapa besar kebutuhan tiap siswa dalam setiap bulan, semester, atau tahunnya (Bastian dalam Sutedjo, 2009:4). Fenomena yang masih kerap terjadi pada saat ini adalah kurang transparannya pihak sekolah dalam mengelola keuangan. Hal ini diperkuat dari Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa

Kuangan (BPK) perwakilan Nusa Tenggara Barat, dimana Rp 455 miliar dana Bantuan Operasi Sekolah (BOS) tahun 2014 untuk daerah NTB dipastikan bermasalah atau sebagai temuan BPK (Lombok Post 14 Februari 2015).

Ditinjau dari perspektif administrasi publik, tujuan manajemen keuangan pendidikan adalah membantu pengelolaan sumber keuangan organisasi pendidikan serta menciptakan mekanisme pengendalian yang tepat bagi pengambilan keputusan keuangan guna mencapai tujuan organisasi pendidikan yang transparan, akuntabel, dan efektif. Pengendalian yang baik dalam manajemen keuangan pendidikan akan memberikan pertanggungjawaban yang baik kepada berbagai pihak yang berkepentingan.

Stakeholders sangat berkepentingan untuk mengetahui informasi mengenai pengelolaan keuangan sekolah, karena disamping untuk keperluan pengawasan, informasi tersebut dipakai sebagai bahan pertimbangan dalam merumuskan kebijakan peningkatan mutu pendidikan. *Stakeholders* sekolah terdiri dari *stakeholders* internal dan eksternal. *Stakeholders* internal yang dimaksud disini adalah pemangku kepentingan yang berada di sekolah yang meliputi guru, karyawan, dan komite sekolah. *Stakeholders* internal ini secara langsung terlibat dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan keuangan sekolah, sehingga mereka bisa mempunyai persepsi yang positif dalam hal transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan sekolah. Sedangkan *stakeholders* eksternal adalah pemangku kepentingan yang berada di luar sekolah meliputi Pengawas SMK Dinas Dikpora Kabupaten, Dewan Pendidikan Kabupaten, dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) peduli pendidikan. *Stakeholders* eksternal mewakili kepentingan publik untuk mengetahui tentang transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan sekolah, namun karena *stakeholders* eksternal tidak terlibat secara langsung dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan keuangan sekolah, maka kemungkinan mereka akan memiliki persepsi yang berbeda dalam hal transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan sekolah dibanding *stakeholders* internal (Sutedjo, 2009).

Penelitian tentang transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan selama ini sering dilakukan di Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), sedangkan penelitian yang berkaitan dengan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan sekolah belum banyak dilakukan. Bahkan untuk kabupaten Lombok Tengah sepengetahuan peneliti belum pernah dilakukan. Oleh karena itulah maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut.

Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah :

1. Adakah perbedaan persepsi antara *stakeholders* internal dengan *stakeholders* eksternal terhadap transparansi pengelolaan keuangan sekolah.
2. Adakah perbedaan persepsi antara *stakeholders* internal dengan *stakeholders* eksternal terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan sekolah.

Berdasarkan uraian di atas, maka tujuan penelitian ini adalah untuk :

1. Membuktikan secara empiris apakah ada perbedaan persepsi antara *stakeholder* internal dengan *stakeholders* eksternal terhadap transparansi pengelolaan keuangan sekolah.

2. Membuktikan secara empiris apakah ada perbedaan persepsi antara stakeholder internal dengan stakeholders eksternal terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan sekolah.

2. Kerangka Teoritis dan Hipotesis

2.1. Good Governance

Governance adalah penggunaan wewenang ekonomi, politik, dan administrasi guna mengelola urusan-urusan negara pada semua tingkat (Krina, 2003). *Governance* merupakan mekanisme pengelolaan sumber daya ekonomi dan sosial yang melibatkan pengaruh sektor negara dan sektor non pemerintah dalam suatu usaha kolektif.

Menurut Bank Dunia, *Good Governance* merupakan suatu penyelenggaraan manajemen pembangunan yang solid dan bertanggung jawab yang sejalan dengan prinsip demokrasi dan pasar yang efisien, penghindaran salah alokasi dana investasi, dan pencegahan korupsi baik secara politik maupun administratif, menjalankan disiplin anggaran serta penciptaan *legal and political framework* bagi tumbuhnya aktivitas usaha (Wibowo, 2013). Adapun cakupan dari *good governance* meliputi negara atau pemerintahan (*state*), sektor swasta atau dunia usaha (*private sector*), dan masyarakat (*society*). Ketiga sektor *good governance* ini saling berinteraksi dan dituntut melaksanakan perannya demi terciptanya sebuah sistem yang efektif dan efisien.

Pelaksanaan *good governance* menurut United Nation Development Program (1997), harus mengacu pada prinsip-prinsip sebagai berikut :

1. *Participation*, yaitu partisipasi dari masyarakat dalam pengambilan keputusan, baik secara langsung maupun melalui lembaga perwakilan yang sah.
2. *Rule of law*, yaitu Penegakan hukum harus adil dan diberlakukan tanpa pandang bulu, termasuk didalamnya hukum-hukum yang menyangkut hak asasi manusia.
3. *Transparency*, yaitu kebebasan memperoleh informasi yang berkaitan dengan kepentingan publik.
4. *Responsiveness*, yaitu keperdulian lembaga-lembaga publik dalam melayani semua pihak yang berkepentingan (*stakeholder*).
5. *Consensus orientation*, yaitu berorientasi pada kepentingan masyarakat luas.
6. *Equity*, yaitu setiap masyarakat memiliki kesempatan yang sama untuk memperoleh kesejahteraan dan keadilan.
7. *Efficiency and effectiveness*, yaitu pengelolaan sumber daya dilakukan secara berdaya guna dan berhasil guna.
8. *Accountability*, yaitu pertanggungjawaban kepada publik atas setiap aktifitas yang dilakukan.

9. *Strategic vision, yaitu penyelenggara pemerintahan dan masyarakat harus memiliki visi jauh kedepan.*

2.2. Stakeholders Theory

Istilah *stakeholder* pertama kali diperkenalkan oleh *Standford Research Institute* pada tahun 1963. Selanjutnya Freeman mengembangkan eksposisi teoritis mengenai *stakeholder* pada tahun 1984 dalam karyanya yang berjudul *Strategic Management: A Stakeholder Approach*. Freeman mendefinisikan stakeholder sebagai kelompok maupun individu yang dapat mempengaruhi atau dipengaruhi oleh proses pencapaian tujuan suatu organisasi. Asumsi teori stakeholder dibangun atas dasar pernyataan bahwa perusahaan berkembang menjadi sangat besar dan menyebabkan masyarakat menjadi sangat terkait dan memperhatikan perusahaan, sehingga perusahaan perlu menunjukkan akuntabilitas maupun tanggung jawab secara lebih luas dan tidak terbatas hanya kepada pemegang saham. Hal ini berarti bahwa perusahaan dan stakeholder membentuk hubungan yang saling mempengaruhi.

Warsono (2009) mengungkapkan bahwa terdapat tiga argumen yang mendukung pengelolaan perusahaan berdasarkan perspektif teori stakeholder, yaitu :

1. *Argumen deskriptif, menyatakan bahwa pandangan pemangku kepentingan secara sederhana merupakan deskripsi yang realistis mengenai bagaimana perusahaan sebenarnya beroperasi dan bekerja.*
2. *Argumen instrumental, menyatakan bahwa manajemen terhadap pemangku kepentingan dinilai sebagai suatu strategi perusahaan.*
3. *Argumen normatif, menyatakan bahwa manajemen terhadap pemangku kepentingan merupakan hal yang benar untuk dilakukan.*

Freeman (1984) mengidentifikasi stakeholder menjadi dua katagori, yaitu :

1. *Stakeholder internal, meliputi pemilik perusahaan, konsumen, karyawan, dan pemasok.*
2. *Stakeholder eksternal, meliputi pemerintah, kompetitor, advokasi konsumen, pemerhati lingkungan, dan media.*

Stakeholders dalam bidang pendidikan dapat diartikan sebagai pihak-pihak yang memiliki hubungan langsung maupun tidak langsung terhadap kegiatan pendidikan. Menurut Supiansyah dalam jelapattamban-blogspot.co.id, *stakeholders* pendidikan dibagi dalam 3 katagori utama, yaitu :

1. Sekolah, yang termasuk di dalamnya adalah kepala sekolah, guru, pegawai tata usaha, dan siswa.
2. Pemerintah, diwakili oleh pengawas, dinas pendidikan, bupati/walikota sampai menteri pendidikan nasional.

3. Masyarakat, yang meliputi orang tua siswa, pengamat dan ahli pendidikan, lembaga swadaya masyarakat, perusahaan atau badan yang membutuhkan tenaga terdidik, penerbit buku, dan penyedia alat pendidikan.

2.3. Persepsi

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, persepsi diartikan sebagai tanggapan (penerimaan) langsung dari suatu atau proses seseorang mengetahui beberapa hal melalui panca inderanya. Menurut Gibson (1996), persepsi meliputi penerimaan stimulus, pengorganisasian stimulus, dan penapsiran stimulus serta diorganisasi dengan cara yang dapat mempengaruhi perilaku dan pembentukan sikap. Sedangkan menurut Irwanto (1997), persepsi adalah suatu proses diterimanya rangsang (obyek, kualitas, hubungan antar gejala maupun peristiwa) sampai rangsang disadari atau diterima. Lebih lanjut Irwanto menyatakan bahwa persepsi dapat juga diartikan sebagai penilaian seseorang terhadap suatu obyek.

Menurut Robins (2006), persepsi adalah proses yang digunakan individu mengelola dan menafsirkan kesan indera mereka dalam rangka memberikan makna kepada lingkungan mereka. Persepsi seseorang dapat berbeda dari kenyataan obyektif sekalipun tidak selalu berbeda namun sering terdapat ketidaksepakatan. Perbedaan individu dalam memandang suatu benda yang sama namun mempersepsikannya secara berbeda, menurut Robins (2006) disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain :

1. Pelaku persepsi, yang meliputi sikap, motif, kepentingan, pengalaman dan pengharapan.
2. Obyek atau target yang dipersepsikan, meliputi hal baru, gerakan, bunyi, ukuran, latar belakang dan kedekatan.
3. Situasi dimana persepsi itu dibuat, meliputi waktu, keadaan tempat kerja dan keadaan sosial.

Menurut teori atribusi dalam Robins (2006) dikatakan bahwa ketika individu-individu mengamati perilaku, mereka berupaya menentukan apakah perilaku itu disebabkan oleh faktor internal atau eksternal. Teori ini menjelaskan bahwa cara menilai orang secara berlainan tergantung pada makna apa yang dikaitkan dengan perilaku tersebut. Faktor penentu dalam teori atribusi adalah sebagai berikut :

- 1) Keunikan, yaitu apakah individu memperlihatkan perilaku-perilaku yang berlainan dalam situasi yang berlainan.
- 2) Konsensus, yaitu apabila seseorang dihadapkan dalam situasi yang sama bereaksi dengan cara yang sama.
- 3) Konsistensi, yaitu apakah seseorang memberikan reaksi dengan cara yang sama dari waktu ke waktu.

Menurut Walgito(1991), persepsi merupakan pengorganisasian, penginterpretasian terhadap stimulus yang diinderanya sehingga merupakan suatu yang berarti, dan merupakan

respon yang integrated dalam diri individu. Faktor yang berperan dalam persepsi adalah obyek yang dipersepsi, alat indera, syaraf dan pusat susunan syaraf, serta perhatian. Perhatian sebagai syarat penting dalam persepsi, sebab tanpa perhatian tidak akan timbul persepsi. Walgito membedakan perhatian atas beberapa macam, yaitu :

1. Ditinjau dari timbulnya perhatian : a) Perhatian spontan, yaitu perhatian yang timbul dengan sendirinya, timbul dengan spontan. b) Perhatian tidak spontan, yaitu perhatian yang ditimbulkan dengan sengaja, karena itu harus ada kemauan untuk menimbulkannya.
2. Ditinjau dari banyaknya obyek : a) Perhatian yang sempit, yaitu perhatian individu pada suatu waktu hanya dapat memperhatikan sedikit obyek. b) Perhatian yang luas, yaitu perhatian individu pada suatu waktu dapat memperhatikan banyak obyek.
3. Ditinjau dari fluktuasi perhatian : a) Perhatian statis, yaitu individu dalam waktu tertentu dapat tetap perhatiannya pada obyek tertentu. b) Perhatian dinamis, yaitu individu dapat memindahkan perhatiannya dari satu obyek ke obyek lain.

Proses terbentuknya persepsi sangat kompleks, ditentukan oleh dinamika yang terjadi dalam diri seseorang ketika ia mendengar, mencium, melihat, merasa atau bagaimana ia memandang suatu obyek dengan melibatkan aspek psikologis dan pancainderanya. Sesuai dengan teori persepsi yang dikemukakan oleh para ahli tersebut, dapat disimpulkan bahwa pembentukan persepsi tersebut sangat dipengaruhi oleh pengamatan, penginderaan terhadap proses berpikir yang dapat mewujudkan suatu kenyataan yang diinginkan oleh seseorang terhadap suatu obyek yang diamati.

Dalam penelitian ini yang menjadi obyek persepsi adalah laporan pengelolaan keuangan sekolah, dimana baik *stakeholders* internal maupun *stakeholders* eksternal memberikan persepsinya tentang transparansi dan akuntabilitas terhadap pengelolaan keuangan sekolah berdasarkan pengamatan yang dilakukan dan informasi yang diterima mengenai pengelolaan keuangan sekolah.

Berdasarkan uraian diatas persepsi *stakeholders* terhadap laporan pengelolaan keuangan sekolah adalah suatu aktivitas mental *stakeholders* dalam proses pengorganisasian dan penerjemahan kesan-kesan, penilaian, dan pendapat dalam merasakan serta menginterpretasikan laporan pengelolaan keuangan sekolah berdasarkan informasi yang ditampilkan sekolah. Persepsi *stakeholders* terhadap laporan pengelolaan keuangan sekolah itu bisa berberda untuk masing-masing *stakeholders* namun bisa juga sama sesuai dengan hasil pengalaman, latar belakang pendidikan, dan karakter psikologi *stakeholders* tersebut.

2.4. Pengelolaan Keuangan Sekolah

Pengelolaan keuangan sekolah haruslah memenuhi persyaratan responsibel, akuntabel, dan transparan (Harsono,2007). Pengelolaan keuangan sekolah yang responsible artinya bahwa semua hal ikhwal yang berkaitan dengan penerimaan sumber dana dan pemanfaatan dana, serta pengelolaan bukti administrasi keuangan dapat dipertanggungjawabkan. Pengelolaan keuangan dapat dipertanggungjawabkan apabila ada kesesuaian antara penerimaan, perencanaan kegiatan,perencanaan pemakaian dana, dan realisasi pemakaian dana.

Pengelolaan keuangan yang akuntabel merupakan kondisi dimana setiap aspek pengelolaan dana yang meliputi penerimaan, pengeluaran, dan administrasinya dapat dipertanggungjawabkan di depan hukum. Jika ada perbedaan penafsiran atau perbedaan kondisi maka personal atau lembaga dapat dikenai delik pidana atau perdata (Harsono,2007). Disamping itu pengelolaan dana harus memenuhi persyaratan transparan. Pengelolaan dana dikatakan transparan apabila aspek-aspek administrasi dari pengelolaan dana tersebut dapat diketahui oleh pihak-pihak yang terkait.

Pengelolaan keuangan sekolah dimulai dari perencanaan dalam bentuk budget sekolah (rencana kegiatan, rencana biaya, rencana hasil), koordinasi antara pihak-pihak yang terkait secara vertikal dan horizontal, pelaksanaan kegiatan yang sesuai dengan struktur, urutan, budget, dan kondisi pasar serta pengendalian kegiatan sekolah dengan berdasarkan pada budget sekolah (Harsono,2007). Budget sekolah merupakan dasar koordinasi, pelaksanaan, dan pengendalian. Semua hal yang berkaitan dengan lalu lintas dana, baik dana masuk maupun keluar harus didasarkan pada bukti, perintah yang tertulis dan jelas, dan rekapan pertanggung jawaban dalam bentuk laporan pertanggung jawaban. Laporan pertanggung jawaban dan lampiran bukti transaksi akan menjadi pijakan bagi pihak lain untuk melakukan audit.

Penyusunan laporan keuangan umumnya dilakukan tiap akhir tahun pembukuan. Sekolah boleh memilih waktu akhir pembukuan pada akhir bulan desember atau akhir bulan juni, bahkan ada yang akhir bulan juli. Kapanpun waktu yang dipilih untuk menyusun laporan keuangan, yang penting waktunya harus konsisten dan ajeg (Harsono,2007). Dengan waktu yang ajeg maka akuntan dapat melakukan analisis yang komparabel. Data akuntansi antara periode satu dengan periode yang lain dapat diperbandingkan, dapat diketahui pertumbuhannya, bahkan detail-detail data dapat diperbandingkan satu dengan yang lain.

2.5. Transparansi

Transparansi adalah keterbukaan atas semua tindakan dan kebijakan yang diambil oleh pemerintah (Hamid, 2007). Prinsip transparansi menciptakan kepercayaan timbal balik antara pemerintah dan masyarakat melalui penyediaan informasi dan menjamin kemudahan didalam memperoleh informasi yang akurat dan memadai. Informasi merupakan suatu kebutuhan penting bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam pengelolaan sekolah. Berkaitan dengan hal tersebut, sekolah perlu proaktif memberikan informasi lengkap tentang kebijakan dan layanan yang disediakannya kepada masyarakat (Darma, 2007).

Menurut Darma (2007) transparansi berarti adanya keterbukaan. Transparansi di bidang manajemen berarti adanya keterbukaan dalam mengelola suatu kegiatan. Dalam lembaga pendidikan, transparansi manajemen keuangan berarti keterbukaan sumber keuangan dan jumlahnya, rincian penggunaan, dan pertanggungjawabannya harus jelas sehingga memudahkan pihak-pihak yang berkepentingan untuk mengetahuinya. Transparansi keuangan sangat diperlukan dalam rangka meningkatkan dukungan orang tua, masyarakat, dan pemerintah dalam penyelenggaraan seluruh program sekolah. Disamping itu transparansi dapat menciptakan kepercayaan timbal balik antara pemerintah, masyarakat, orang tua siswa dan warga sekolah melalui penyediaan informasi dan menjamin kemudahan dalam memperoleh informasi yang akurat dan memadai.

Dalam konteks pendidikan, transparansi sangat jelas yaitu kepolosan apa adanya, tidak bohong, jujur dan terbuka terhadap publik tentang apa yang dikerjakan oleh sekolah (Hamid, 2007). Informasi keuangan yang bebas diketahui oleh semua warga sekolah dan orang tua siswa seperti rencana anggaran pendapatan dan belanja sekolah yang dapat ditempel di papan pengumuman, sehingga siapa saja yang membutuhkan informasi itu bisa dengan mudah mendapatkannya. Hal ini akan menambah kepercayaan *stakeholders* terhadap sekolah.

2.6. Akuntabilitas

Dalam bahasa Inggris, kata akuntabilitas disebut dengan *accountability* yang diartikan sebagai yang dapat dipertanggungjawabkan. Dalam pengertian yang sempit, akuntabilitas dapat dipahami sebagai bentuk pertanggungjawaban yang mengacu kepada siapa individu atau organisasi bertanggung jawab dan untuk apa individu atau organisasi bertanggung jawab.

Menurut Mahsun (2011), akuntabilitas adalah kewajiban pihak pemegang amanah (*agent*) untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya kepada pihak pemberi amanah (*principal*) yang memiliki hak dan wewenang untuk meminta pertanggungjawaban tersebut.

Dalam konteks pendidikan, akuntabilitas merupakan pertanggungjawaban lembaga pendidikan dalam mencapai tujuan pendidikan. Sedangkan akuntabilitas sekolah diartikan sebagai kewajiban sekolah sebagai lembaga pendidikan untuk memberikan pertanggungjawaban atau untuk menjawab dan menerangkan kinerja dan tindakan penyelenggara pendidikan kepada pihak yang memiliki hak atau berkewenangan untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban (Wibowo, 2013)

Pertanggungjawaban penyelenggara sekolah merupakan akumulasi dari keseluruhan pelaksanaan tugas-tugas pokok dan fungsi sekolah yang perlu disampaikan kepada publik atau *stakeholders*. Akuntabilitas sekolah meliputi pertanggungjawaban penyelenggara sekolah yang diwujudkan melalui transparansi, dengan cara menyebarluaskan informasi tersebut dalam hal :

1. Perencanaan, pembuatan, dan pelaksanaan kebijakan
2. Anggaran pendapatan dan belanja sekolah
3. Pengelolaan sumber daya pendidikan di sekolah
4. Keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan rencana sekolah dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Berdasarkan tinjauan teori di atas, maka hipotesis dari penelitian ini adalah :

1. Terdapat perbedaan persepsi antara *stakeholders* internal dengan *stakeholders* eksternal terhadap transparansi pengelolaan keuangan sekolah.
2. Terdapat perbedaan persepsi antara *stakeholders* internal dengan *stakeholders* eksternal terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan sekolah.

3. Metode Penelitian

Penelitian ini termasuk jenis penelitian deskriptif kuantitatif, karena memberikan gambaran mengenai persepsi stakeholders terhadap transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan SMK Negeri di Kabupaten Lombok Tengah. Metode penelitian kuantitatif dapat diartikan sebagai metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme, digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu, pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian, analisis data bersifat kuantitatif/ststistik, dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan (Sugiyono, 2011).

Populasi dari penelitian ini adalah semua guru, karyawan, pengurus komite sekolah di sekolah yang menjadi obyek penelitian, yaitu SMK Negeri 1 Praya Tengah, SMK Negeri 1 Praya, SMK Negeri 1 Kopang, SMK Negeri 1 Pujut, SMK Negeri 1 Janapria, SMK Negeri 1 Batukliang, SMK Negeri 1 Batukliang Utara, SMK Negeri 1 Praya Barat, dan SMK Negeri 2 Praya Tengah, juga pengawas SMK dari Dinas Dikpora Kabupaten Lombok Tengah, Anggota Dewan Pendidikan Kabupaten Lombok Tengah, dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang peduli dengan bidang pendidikan. Jumlah populasi penelitian ini adalah 698 orang.

Jumlah sampel yang digunakan dalam penelitian ini diambil berdasarkan pada tabel yang dikembangkan oleh Isaac dan Michael dalam Sugiyono (2011). Rumus untuk menentukan ukuran sampel dari populasi yang diketahui jumlahnya adalah sebagai berikut :

$$S = \frac{\lambda^2 \cdot N \cdot Q}{d^2 (N-1) + \lambda^2 \cdot P \cdot Q}$$

λ^2 dengan dk = 1, taraf kesalahan bisa 1%, 5%, 10%

P = Q = 0,5. d = 0,05. S = Jumlah sampel

Berdasarkan rumus dan tabel penentuan sampel dari populasi yang dikembangkan oleh Isaac dan Michael, dengan jumlah populasi sebesar 698 dengan tingkat kesalahan 5% maka jumlah sampel dalam penelitian ini adalah 227.

Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah *probability sampling*, yaitu teknik pengambilan sampel yang memberikan peluang yang sama bagi setiap unsur (anggota) populasi untuk dipilih menjadi anggota sampel (Sugiyono, 2011). Penerapan *probability sampling* dilakukan dengan teknik *simple random sampling*. Adapun alasan peneliti menggunakan teknik *simple random sampling* adalah karena pengambilan anggota sampel dari populasi dilakukan secara acak tanpa memperhatikan strata yang ada dalam populasi. Teknis pengambilan sampel dilakukan dengan cara membuat undian sejumlah populasi yang ada pada setiap kelompok responden. Pengundian dilakukan sampai mencukupi jumlah sampel yang dibutuhkan. Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini berupa kuesioner dengan skala likert 5 interval. Teknik anisis data meliputi uji validitas, uji reliabilitas, uji normalitas, dan uji t dengan bantuan software SPSS Versi 16.

4. Analisis Data

4.1. Uji Normalitas Data Variabel Transparansi dan Akuntabilitas

Selanjutnya untuk mengetahui distribusi jawaban responden mengenai transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan sekolah, maka berikut ini disajikan hasil uji normalitas datanya :

Tabel 1. Uji Normalitas Data

| No. | Nama Variabel | P hitung | Keterangan |
|-----|--|----------|---------------------------------|
| 1 | Persepsi <i>stakeholders</i> tentang transparansi | 0,000 | Data tidak terdistribusi normal |
| 2 | Persepsi <i>stakeholders</i> tentang akuntabilitas | 0,001 | Data tidak terdistribusi normal |

Sumber : Data Primer diolah

Tabel 1 menunjukkan bahwa variabel persepsi *stakeholders* tentang transparansi mempunyai nilai p sebesar $0,000 < 0,05$, ini berarti datanya tidak berdistribusi normal, sehingga uji hipotesis selanjutnya menggunakan statistik non parametrik, yaitu *Mann Whitney*. Demikian juga dengan variabel persepsi *stakeholders* tentang akuntabilitas, nilai p nya $0,001 < 0,005$, berarti datanya tidak berdistribusi secara normal sehingga uji hipotesisnya menggunakan *Mann Whitney*.

4.2. Persepsi *Stakeholders* Terhadap Transparansi Pengelolaan Keuangan Sekolah

Berikut ini ditampilkan data rata-rata nilai persepsi *stakeholders* internal dan eksternal terhadap transparansi pengelolaan keuangan SMK Negeri di Kabupaten Lombok Tengah :

Tabel 2. Rata-Rata Nilai *Stakeholders* Tentang Transparansi

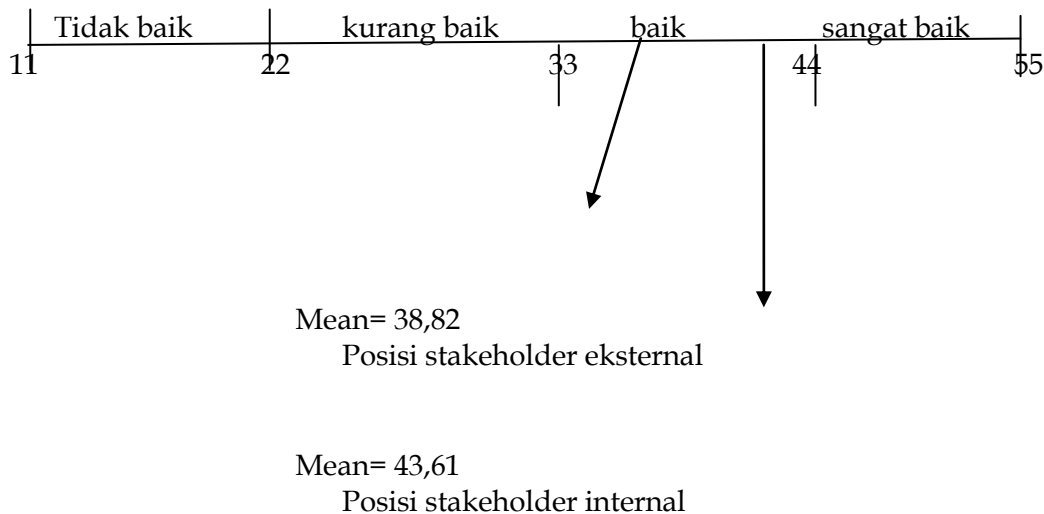
| No | <i>Stakeholders</i> | N | Mean | Std.Deviation |
|----|-------------------------------|-----|-------|---------------|
| 1. | <i>Stkeholders</i> Internal | 210 | 43,61 | 5,14 |
| 2. | <i>Stakeholders</i> Eksternal | 17 | 38,82 | 5,72 |

Data persepsi *stakeholders* internal dan eksternal tentang transparansi diambil dari kuesioner yang berisi 11 butir pernyataan dengan 5 alternatif jawaban dengan skala 1 sampai dengan 5 sehingga didapat skor maksimal ($11 \times 5 = 55$) dan skor minimal ($11 \times 1 = 11$), rentang skor 11 sampai dengan 55. Dari hasil jawaban responden didapatkan nilai rata-rata persepsi *stakeholders* internal tentang transparansi sebesar 43,61 dengan standar deviasi 5,14. Sedangkan nilai rata-rata *stakeholders* eksternal adalah 38,82 dengan standar deviasi 5,72.

Apabila data dibagi menjadi 4 katagori yaitu tidak baik, kurang baik, baik, dan sangat baik, maka berdasarkan rata-ratanya variabel persepsi *stakeholders* internal tentang transparansi masuk katagori baik karena berada pada skala interval 33 sampai dengan 44. Demikian juga dengan variabel persepsi *stakeholders* eksternal tentang transparansi masuk dalam katagori baik

kaena nilai rata-ratanya berada diantara 33 dan 44. Interval diperoleh dengan membagi rank sebesar 44 (55 - 11) dengan 4 katagori sehingga diperoleh jarak tiap-tiap interval sebesar 11. Untuk memperjelas posisi rata-rata persepsi *stakeholders* tentang transparansi dapat dilihat pada gambar berikut :

Gambar 1. Posisi Rata-Rata Persepsi Stakeholders Tentang Transparansi



4.3. Persepsi Stakeholders Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Sekolah

Berikut ini ditampilkan data rata-rata nilai persepsi *stakeholders* internal dan eksternal terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan SMK Negeri di Kabupaten Lombok Tengah :

Tabel 3. Rata-Rata Nilai Stakeholders Tentang Akuntabilitas

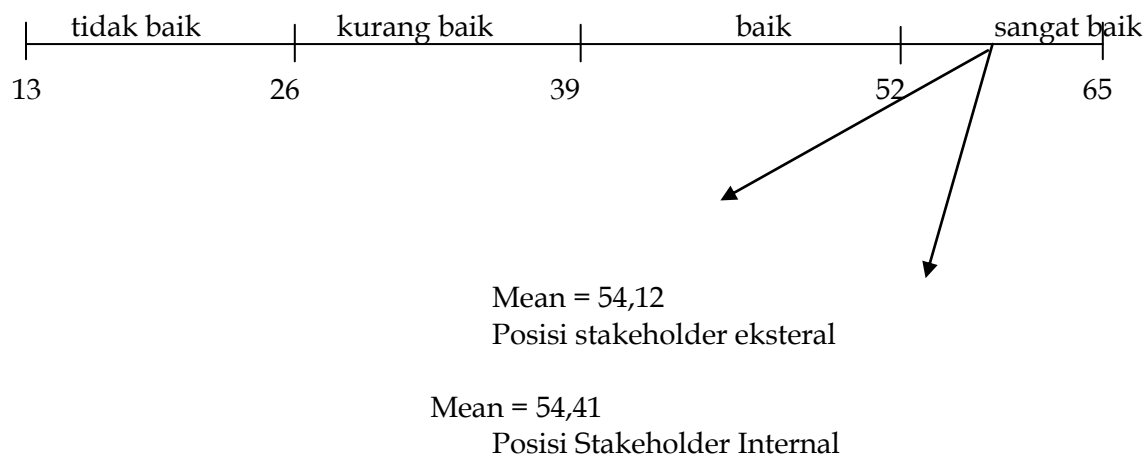
| No | Stakeholders | N | Mean | Std.Deviation |
|----|------------------------|-----|-------|---------------|
| 1. | Stkeholders Internal | 210 | 54,41 | 4,60 |
| 2. | Stakeholders Eksternal | 17 | 54,12 | 4,42 |

Sumber : Data Primer diolah

Data persepsi *stakeholders* internal dan eksternal tentang akuntabilitas diambil dari kuesioner yang berisi 13 butir pernyataan dengan 5 alternatif jawaban dengan skala 1 sampai dengan 5 sehingga didapat skor maksimal ($13 \times 5 = 65$) dan skor minimal ($13 \times 1 = 13$), rentang skor 13 sampai dengan 65. Dari hasil jawaban responden didapatkan nilai rata-rata persepsi *stakeholders* internal tentang akuntabilitas sebesar 54,41 dengan standar deviasi 4,60. Sedangkan nilai rata-rata *stakeholders* eksternal adalah 54,12 dengan standar deviasi 4,42.

Apabila data dibagi menjadi 4 katagori yaitu tidak baik, kurang baik, baik, dan sangat baik, maka berdasarkan rata-ratanya variabel persepsi *stakeholders* internal tentang akuntabilitas masuk katagori sangat baik karena berada pada skala interval 52 sampai dengan 65. Demikian juga dengan variabel persepsi *stakeholders* eksternal tentang akuntabilitas masuk dalam katagori sangat baik kaena nilai rata-ratanya berada diantara 52 dan 65. Interval diperoleh dengan membagi rank sebesar 52 (65 - 13) dengan 4 katagori sehingga diperoleh jarak tiap-tiap interval sebesar 13. Untuk memperjelas posisi rata-rata persepsi *stakeholders* tentang akuntabilitas dapat dilihat pada gambar berikut :

Gambar 2. Posisi Rata-Rata Persepsi Stakeholders Tentang Akuntabilitas



4.4. Uji Perbedaan Rata-Rata Persepsi *Stakeholders* Internal Dan *Stakeholders* Eksternal Tentang Transparansi Pengelolaan Keuangan Sekolah

Hasil uji Mann Whitney perbedaan rata-rata persepsi *stakeholders* internal dan *stakeholders* eksternal tentang transparansi pengelolaan keuangan sekolah ditampilkan pada tabel berikut :

Tabel 4. Uji Perbedaan Rata-Rata *Stakeholders* Internal Dan Eksternal Tentang Transparansi

| Test Statistics ^a | |
|------------------------------|-------------|
| | tranparansi |
| Mann-Whitney U | 879.000 |
| Wilcoxon W | 1032.000 |
| Z | -3.490 |
| Asymp. Sig. (2-tailed) | .000 |

a. Grouping Variable: stakeholders

Tabel 4 di atas menunjukkan bahwa dari hasil uji t independent Mann Whitney diperoleh nilai Z hitung $3,490 > Z$ tabel dengan tingkat signifikan $0,000 < 0,05$, dimana diketahui nilai Z tabel adalah 1,96. Dengan hasil pengujian maka hipotesis nol ditolak artinya ada perbedaan yang signifikan antara persepsi *stakeholders* internal dengan *stakeholders* eksternal tentang transparansi pengelolaan keuangan sekolah. Nilai rata-rata persepsi *stakeholders* internal adalah 43,61, sedangkan nilai rata-rata persepsi *stakeholders* eksternal adalah 38,82, ini berarti nilai yang diperoleh *stakeholders* internal lebih tinggi dari nilai rata-rata *stakeholders* eksternal.

4.5. Uji Perbedaan Rata-Rata Persepsi *Stakeholders* Internal Dan *Stakeholders* Eksternal Tentang Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Sekolah.

Hasil uji Mann Whitney perbedaan rata-rata persepsi *stakeholders* internal dan *stakeholders* eksternal tentang transparansi pengelolaan keuangan sekolah ditampilkan pada tabel berikut :

Tabel 5. Uji Perbedaan Rata-Rata *Stakeholders* Internal Dan Eksternal Tentang Akuntabilitas

| Test Statistics ^a | |
|------------------------------|---------------|
| | akuntabilitas |
| Mann-Whitney U | 1777.500 |
| Wilcoxon W | 23932.500 |
| Z | -.029 |
| Asymp. Sig. (2-tailed) | .977 |

a. Grouping Variable: stakeholders

Tabel 5 di atas menunjukkan bahwa dari hasil uji t independent Mann Whitney diperoleh nilai Z hitung $0,029 < Z$ tabel dengan tingkat signifikan $0,977 > 0,05$, dimana diketahui nilai Z tabel adalah 1,96. Dengan hasil pengujian ini maka hipotesis nol diterima artinya tidak ada perbedaan yang signifikan antara persepsi *stakeholders* internal dengan *stakeholders* eksternal tentang akuntabilitas pengelolaan keuangan sekolah. Nilai rata-rata persepsi *stakeholders* internal adalah 54,41, sedangkan nilai rata-rata persepsi *stakeholders* eksternal adalah 54,12, ini berarti nilai yang diperoleh *stakeholders* internal tidak jauh berbeda dengan nilai rata-rata *stakeholders* eksternal.

5. Pembahasan dan Simpulan

5.1. Pembahasan

Berdasarkan hasil uji Mann Whitney yang tercantum pada pada tabel 2, nilai rata-rata persepsi *stakeholders* internal tentang transparansi pengelolaan keuangan sekolah sebesar 43,61, sedangkan *stakeholders* eksternal rata-ratanya 38,82. Jika dibandingkan, maka nilai rata-rata yang diperoleh *stakeholders* internal lebih tinggi dari *stakeholders* eksternal, hal ini menunjukkan adanya perbedaan persepsi mengenai transparansi pengelolaan keuangan

sekolah. Selain itu perbedaan persepsi ini mengandung makna bahwa keterlibatan *stakeholders* internal sekolah dalam merencanakan, melaksanakan dan penyusunan laporan dapat memberikan pengaruh persepsi yang lebih baik terhadap transparansi pengelolaan keuangan sekolah.

Hasil uji Mann Whitney tentang transparansi pengelolaan keuangan sekolah berbeda dengan hasil uji *Mann Whitney* tentang akuntabilitas pengelolaan keuangan sekolah dimana pada tabel 3, nilai rata-rata persepsi *stakeholders* internal tentang akuntabilitas sebesar 54,41, sedangkan persepsi *stakeholders* eksternal nilai rata-ratanya tidak jauh berbeda yaitu sebesar 54,12. Hal ini berarti tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara persepsi *stakeholders* internal dengan *stakeholders* eksternal mengenai akuntabilitas pengelolaan keuangan sekolah, atau dengan perkataan lain *stakeholders* internal dan *stakeholders* eksternal sama-sama memberikan persepsi yang sangat baik atau persepsi positif terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan sekolah pada SMK Negeri di Kabupaten Lombok Tengah.

Hasil penelitian ini berbeda dengan penelitian tentang persepsi *stakeholders* terhadap transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan Sekolah Menengah Pertama di Kabupaten Kendal yang dilakukan oleh Sutedjo (2009), dimana kesimpulan dari hasil penelitiannya adalah bahwa antara *stakeholders* internal dan *stakeholders* eksternal terdapat persepsi yang berbeda terhadap transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan sekolah. Berdasarkan hasil uji Mann Whitney untuk hipotesis pertama yang berbunyi " Terdapat perbedaan persepsi antara *stakeholders* internal dengan *stakeholders* eksternal terhadap transparansi pengelolaan keuangan sekolah" diperoleh nilai Z hitung $3,490 > Z$ tabel dengan tingkat signifikan $0,000 < 0,05$ dimana Z tabel diketahui sebesar 1,96, sehingga hipotesis pertama diterima artinya ada perbedaan yang signifikan antara persepsi *stakeholders* internal dengan *stakeholders* eksternal tentang transparansi pengelolaan keuangan sekolah. Nilai rata-rata yang diperoleh *stakeholders* internal lebih tinggi dari nilai rata-rata yang diperoleh *stakeholders* eksternal.

Perbedaan persepsi antara *stakeholders* internal dengan *stakeholders* eksternal ini disebabkan karena *stakeholders* internal yang terdiri dari guru, karyawan, dan komite sekolah terlibat dari awal yaitu sejak sekolah membuat perencanaan, melaksanakan anggaran, dan pelaporan keuangan. Keterlibatan *stakeholders* internal secara langsung dalam proses penganggaran memberikan persepsi yang baik tentang transparansi pengelolaan keuangan sekolah. Berbeda dengan *stakeholders* eksternal yang sejak awal tidak terlibat secara langsung dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan keuangan sekolah, sehingga persepsi mereka hanya didasarkan pada laporan dari masyarakat yang menduga tidak adanya keterbukaan sekolah dalam pengelolaan keuangan.

Berdasarkan hasil uji Mann Whitney untuk hipotesis kedua yang berbunyi " Terdapat perbedaan persepsi antara *stakeholders* internal dengan *stakeholders* eksternal terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan sekolah" diperoleh nilai Z hitung $0,029 < Z$ tabel dengan tingkat signifikan $0,977 > 0,05$ dimana Z tabel diketahui sebesar 1,96, sehingga hipotesis kedua ditolak artinya tidak ada perbedaan yang signifikan antara persepsi *stakeholders* internal dengan *stakeholders* eksternal tentang akuntabilitas pengelolaan keuangan sekolah. Nilai rata-rata yang diperoleh *stakeholders* internal tidak jauh berbeda dari nilai rata-rata yang diperoleh *stakeholders* eksternal. Hasil uji ini mengandung makna *stakeholders* internal dan *stakeholders* eksternal memberikan penilaian bahwa pihak sekolah telah mengelola keuangannya secara akuntabel

5.2. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Terdapat perbedaan persepsi antara *stakeholders* internal dengan *stakeholders* eksternal terhadap transparansi pengelolaan keuangan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri di Kabupaten Lombok Tengah.
2. Tidak terdapat perbedaan persepsi antara *stakeholders* internal dengan *stakeholders* eksternal terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri di Kabupaten Lombok Tengah.
3. Penyebab perbedaan persepsi antara *stakeholders* internal dengan *stakeholders* eksternal terhadap transparansi pengelolaan keuangan sekolah adalah karena *stakeholders* internal terlibat secara langsung dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan penggunaan anggaran keuangan sekolah. Sedangkan *stakeholders* eksternal tidak terlibat secara langsung sebagaimana *stakeholders* internal.
4. Persepsi *stakeholders* internal dan *stakeholders* eksternal terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan sekolah tidak terdapat perbedaan. Hal ini disebabkan karena *stakeholders* internal dan *stakeholders* eksternal sama-sama menilai bahwa sekolah telah melakukan penganggaran keuangan secara prosedural dan melaporkan pertanggungjawaban penggunaannya kepada orang tua atau wali murid.

DAFTAR PUSTAKA

- Anonim. 1999. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*. Sekretariat Negara. Jakarta.
- . 2003. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 *Tentang Keuangan Negara*. Sekretariat Negara. Jakarta.
- . 2004. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 *Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah*. Sekretariat Negara. Jakarta.
- . 2014 . Undang Nomor 23 Tahun 2014 *Tentang Pemerintah Daerah*. Sekretariat Negara. Jakarta.
- . 1999. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 *Tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi Kolusi dan Nepotisme*. Sekretariat Negara. Jakarta.
- . 2003. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 *Tentang Sistem Pendidikan Nasional*. Sekretariat Negara. Jakarta.
- . 1999. Intruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 *Tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah*. Sekretariat Negara. Jakarta.

- Darma Surya. 2007. *Manajemen Keuangan Sekolah*. Direktorat Tenaga Kependidikan, Direktorat Jendral Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan. Jakarta
- Gibson James L. Ivancevick John M. Donnelly James H. 1996. *Organisasi Perilaku Struktur dan Proses*. Erlangga. Jakarta
- Harsono. 2007. *Pengelolaan Pembiayaan Pendidikan*. Pustaka Book Publisher. Yogyakarta
- <http://www.antaraneews.com/berita/69715>. *ICW Nyatakan Pengelolaan Dana BOS Syarat Korupsi*. Diakses pada tanggal 27 Februari 2015
- Irwanto. 1997. *Psikologi Umum*. Gramedia Pustaka Utama. Jakarta
- Jalapattamban.blogspot.co.id. *Manajemen Stakeholders dan Lingkungan Pendidikan*. Diakses pada tanggal 27 Februari 20015
- Lolina Lalolo Krina. 2003. *Indikator dan Alat Ukur Prinsip Akuntabilitas Transparansi dan Partisipasi*. Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. Jakarta
- Mahsun Moh. 2011. *Akuntansi Sektor Publik*. BPFE. Yogyakarta
- murwahidummah.blogspot.com/213/10/v-behavioruridefaultmlo.html. *Pengertian Stakeholder* diakses pada tanggal 27 April 2015
- Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa. 1999, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Balai Pustaka. Jakarta.
- PT. Suaranusa Media Pratama. Lombok Post. No. 8195, Tahun XXIII, 14 Februari, 2015: 14
- Robbins Stephen. 2006. *Perilaku Organisasi*. PT. Indexks. Jakarta
- Sugiyono. 2011. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D*. Alfabeta. Bandung
- Sutedjo. 2009. *Persepsi Stakeholders Terhadap Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Sekolah di Sekolah Menengah Pertama Standar Nasional Kabupaten Kendal*. Tesis. Universitas Diponegoro
- Wacanasainsdilibel.blogspot.co.id. *Stakeholder Pendidikan*. Diakses pada tanggal 20 April 2015
- Walgito. 2001. *Pengantar Psikologi Umum*. Penerbit Fakultas Psikologi UGM. Yogyakarta
- Wibowo Agus. 2013. *Akuntabilitas Pendidikan*. Pustaka Pelajar. Yogyakarta